



## Analisis Peran Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti dalam Mengelola Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi pada Wisata Air Terjun Lapopu Kabupaten Sumba Barat)

Antonius Nandito Laput<sup>1\*</sup>, Marthina Raga Lay<sup>2</sup>, Aspri Budi Oktavianto<sup>3</sup>,  
Jeni Jacoba Therik<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [antoniusn17@gmail.com](mailto:antoniusn17@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [marthina.lay@staf.undana.ac.id](mailto:marthina.lay@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [aspribudi@staf.undana.ac.id](mailto:aspribudi@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>,  
[jenytherik06@gmail.com](mailto:jenytherik06@gmail.com)<sup>4</sup>

\*Korespondensi penulis: [antoniusn17@gmail.com](mailto:antoniusn17@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the role of the Manupeu Tanah Daru and Laiwangi Wanggameti National Park Office (Balai TN MaTaLaWa) in managing community-based tourism at Lapopu Waterfall, Rewarara Village, Wanokaka District, West Sumba Regency. The research employed a qualitative descriptive approach to understand the implementation of community-based tourism management in the conservation area. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature study involving the National Park Office, village government, local communities, tourism managers, and tourists. The results indicate that Balai TN MaTaLaWa has performed its role as regulator, facilitator, catalyst, and dynamizer in tourism management. Its role as regulator is reflected in the establishment of tourism management rules and supervision of conservation areas. As a facilitator, the institution supports tourism facilities and community economic activities. As a catalyst, Balai TN MaTaLaWa builds cooperation among stakeholders, while as a dynamizer it provides training and tourism awareness education to local communities. The implementation of Community Based Tourism (CBT) has involved local communities in tourism activities, particularly as tour guides and environmental caretakers. However, tourism management still faces several challenges, including limited tourism human resources, inadequate supporting facilities, and unstable water discharge affecting the attractiveness of Lapopu Waterfall. Therefore, strengthening community capacity, improving infrastructure, and enhancing cooperation among stakeholders are necessary to support sustainable tourism management in the area.*

**Keywords:** *Balai TN MaTaLaWa; Community-Based Tourism; Lapopu Waterfall; National Park; Tourism Management.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (Balai TN MaTaLaWa) dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Wisata Air Terjun Lapopu, Desa Rewarara, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami pelaksanaan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan konservasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan pihak Balai TN MaTaLaWa, pemerintah desa, masyarakat, pengelola wisata, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai TN MaTaLaWa telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisor dalam pengelolaan wisata Air Terjun Lapopu. Peran regulator diwujudkan melalui penetapan aturan dan pengawasan kawasan wisata. Peran fasilitator dilakukan melalui penyediaan fasilitas wisata dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Peran katalisator terlihat melalui pembangunan kerja sama antar pemangku kepentingan, sedangkan peran dinamisor diwujudkan melalui pelatihan dan edukasi sadar wisata kepada masyarakat. Penerapan *Community Based Tourism* (CBT) telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan wisata, khususnya sebagai pemandu wisata dan penjaga lingkungan kawasan wisata. Namun demikian, pengelolaan wisata masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang pariwisata, fasilitas pendukung yang belum optimal, serta debit air yang tidak stabil sehingga mempengaruhi daya tarik wisata Air Terjun Lapopu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan sarana wisata, dan penguatan kerja sama antar pihak terkait guna mendukung pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Air Terjun Lapopu; Balai TN MaTaLaWa; Pariwisata Berbasis Masyarakat; Pengelolaan Wisata; Taman Nasional.

## **1. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mengembangkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata desa diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok ke suatu tempat untuk rekreasi dan memperoleh pengalaman baru yang didukung oleh fasilitas dan pelayanan dari masyarakat maupun pemerintah. Menurut Junianto dan Helmut (2006) dalam Heri dan Larasati (2012), potensi wisata merupakan seluruh objek wisata, baik alam, budaya, maupun buatan, yang memiliki daya tarik dan dapat dikembangkan untuk kegiatan pariwisata.

Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi wisata alam yang cukup besar. Salah satu objek wisata yang terkenal adalah Air Terjun Lapopu yang berada di Desa Rewarara, Kecamatan Wanokaka, dalam kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru. Air terjun ini memiliki keindahan alam yang masih alami dengan air berwarna hijau toska dan bentuk bertingkat yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Berdasarkan data Pemungutan PNPB Objek Wisata Alam Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan ke Air Terjun Lapopu mencapai 4.773 orang, terdiri dari 1.840 wisatawan nusantara dan 2.933 wisatawan mancanegara. Data tersebut menunjukkan bahwa Air Terjun Lapopu memiliki potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan dan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

Namun demikian, pengelolaan wisata Air Terjun Lapopu masih menghadapi beberapa kendala. Kondisi akses jalan menuju lokasi masih kurang baik, fasilitas wisata seperti tempat istirahat, area parkir, dan sarana kebersihan masih terbatas, serta belum adanya kelompok usaha masyarakat seperti UMKM kuliner dan suvenir. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata juga masih belum maksimal.

Pengelolaan kawasan wisata konservasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam hal ini, Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (Balai TN MaTaLaWa) memiliki tugas dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan

wisata alam secara berkelanjutan. Balai TN MaTaLaWa juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan wisata Air Terjun Lapopu.

Konsep pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism/CBT*) menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata. Menurut Anstrand (2006) dalam Suganda (1970), *Community Based Tourism* merupakan bentuk pariwisata yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, Akbar (2018) dalam Ilham Zitri et al. (2020) menjelaskan bahwa masyarakat harus berperan sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata.

Meskipun konsep pariwisata berbasis masyarakat mulai diterapkan di Air Terjun Lapopu, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada kegiatan sederhana seperti menjaga kebersihan, membantu wisatawan, dan menjadi pemandu wisata. Masyarakat belum banyak terlibat dalam pengembangan usaha wisata maupun pengelolaan fasilitas wisata. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara masyarakat, pemerintah, dan Balai TN MaTaLaWa agar pengelolaan wisata dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti dalam mengelola pariwisata berbasis masyarakat di objek wisata Air Terjun Lapopu, Desa Rewarara, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Peran**

Teori peran menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status atau posisi yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan menjalankan peran apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Menurut Soekanto (2010) dalam Rumawas et al. (2021), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial. Sementara itu, Rivai (2006) dalam Maddimunri (2015) menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Dalam konteks pemerintahan, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur pembangunan masyarakat. Menurut Rasyid (1998), peran pemerintah yaitu, sebagai regulator, yaitu membuat aturan dan kebijakan, sebagai dinamisator, yaitu mendorong partisipasi masyarakat, sebagai fasilitator, yaitu menyediakan sarana dan dukungan pembangunan dan sebagai katalisator, yaitu mempercepat kerja sama antar pihak dalam pembangunan.

### **Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti**

Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (Balai TN MaTaLaWa) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Balai ini bertugas mengelola kawasan konservasi di Pulau Sumba, termasuk kawasan wisata Air Terjun Lapopu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016, Balai TN MaTaLaWa memiliki tugas melaksanakan pengelolaan taman nasional melalui perlindungan kawasan, pelestarian flora dan fauna, rehabilitasi ekosistem, serta pengembangan wisata alam secara berkelanjutan. Selain itu, Balai TN MaTaLaWa juga memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan, pengembangan ekowisata, dan pendampingan masyarakat sekitar kawasan wisata.

### **Konsep Pariwisata**

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok ke suatu tempat untuk sementara waktu dengan tujuan rekreasi, pendidikan, kesehatan, maupun tujuan lainnya. Pendit (1999) dalam Rusdi (2017) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan perjalanan sementara ke luar tempat tinggal yang disertai dengan berbagai aktivitas wisata.

Menurut Hamit (2021), pariwisata merupakan seluruh kegiatan wisata yang didukung oleh pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan wisata. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan perjalanan, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

### **Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata merupakan upaya meningkatkan kualitas dan daya tarik wisata agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Page (2003) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan ekonomi, pendekatan lingkungan, pendekatan masyarakat, dan pendekatan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis masyarakat dan keberlanjutan menjadi penting karena pengembangan wisata tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

### **Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism/CBT*) merupakan konsep pengembangan wisata yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan wisata. Menurut Masriana (2019), konsep ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pariwisata.

Nurhidayati (2012) dalam Manteiro (2023) menjelaskan bahwa *Community Based Tourism* menekankan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wisata berbasis budaya dan potensi lokal. Dalam konsep ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan wisata.

Menurut Sunaryo (2013) dalam Masriana (2019), prinsip utama pariwisata berbasis masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan wisata, menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan budaya dan karakter lokal. Dengan demikian, konsep *Community Based Tourism* menjadi pendekatan yang tepat dalam pengembangan wisata Air Terjun Lapopu karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan wisata.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara menyeluruh berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui peran Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (Balai TN MaTaLaWa) dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Air Terjun Lapopu.

Penelitian dilakukan di objek wisata Air Terjun Lapopu, Desa Rewarara, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Fokus penelitian meliputi peran Balai TN MaTaLaWa sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak Balai TN MaTaLaWa, pemerintah desa,

pengelola wisata, masyarakat, dan wisatawan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen resmi, laporan kegiatan, serta peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan wisata Air Terjun Lapopu. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran Balai TN MaTaLaWa dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (Balai TN MaTaLaWa) memiliki peran penting dalam pengelolaan wisata Air Terjun Lapopu melalui fungsi sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator. Peran tersebut dijalankan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan wisata alam dan pelestarian kawasan konservasi.

##### ***Peran Regulator***

Sebagai regulator, Balai TN MaTaLaWa menetapkan berbagai aturan pengelolaan wisata berdasarkan ketentuan konservasi, seperti Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah mengenai PNBP, serta aturan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan wisata Air Terjun Lapopu agar kegiatan wisata tetap berjalan sesuai prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, Balai TN juga menerapkan sistem perizinan melalui tiket masuk wisata dan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Pengawasan terhadap aktivitas wisata dilakukan oleh petugas lapangan bersama masyarakat yang terlibat sebagai pemandu wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa Balai TN MaTaLaWa telah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sesuai konsep peran pemerintah sebagai regulator menurut Rasyid (1998).

### ***Peran Fasilitator***

Peran fasilitator diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata seperti jalur trekking, jembatan, reling bambu, dan tempat istirahat bagi pengunjung. Balai TN MaTaLaWa juga melakukan perawatan fasilitas secara berkala untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. Selain penyediaan fasilitas, Balai TN memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat melalui pembentukan kelompok pemandu wisata dan pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha kecil di sekitar kawasan wisata. Keberadaan wisata Air Terjun Lapopu memberikan peluang ekonomi tambahan bagi masyarakat melalui jasa pemandu wisata maupun penjualan makanan dan minuman kepada wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Balai TN MaTaLaWa telah menjalankan peran sebagai fasilitator dengan mendukung keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata berbasis konservasi.

### ***Peran Katalisator***

Balai TN MaTaLaWa juga menjalankan fungsi sebagai katalisator melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam mendukung pengembangan wisata Air Terjun Lapopu. Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk pembangunan fasilitas wisata, perbaikan jalur trekking, pembangunan lopo, serta koordinasi dalam pengelolaan kawasan wisata. Selain itu, koordinasi antara Balai TN dan pemerintah desa dilakukan secara rutin dalam kegiatan kebersihan, keamanan, dan pengelolaan jasa pemandu wisata lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata Air Terjun Lapopu dilakukan melalui kolaborasi antar stakeholder untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan mendukung pengembangan wisata secara berkelanjutan.

### ***Peran Dinamisator***

Sebagai dinamisator, Balai TN MaTaLaWa melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan wisata. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Pariwisata dan lembaga pendidikan dalam bentuk pelatihan pemandu wisata, pelayanan wisatawan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan wisata, seperti membersihkan jalur menuju air terjun dan memperbaiki akses jalan secara swadaya. Kondisi ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan wisata Air Terjun Lapopu.

## **Tantangan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pengelolaan wisata Air Terjun Lapopu masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang pariwisata, terutama dalam pelayanan wisata dan kemampuan bahasa asing. Selain itu, faktor lingkungan seperti penurunan debit air akibat pemanfaatan air untuk PLTMH juga mempengaruhi daya tarik wisata Air Terjun Lapopu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat masih memerlukan peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang lebih optimal agar keberlanjutan kawasan wisata tetap terjaga.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (Balai TN MaTaLaWa) telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Wisata Air Terjun Lapopu. Peran regulator terlihat melalui penetapan aturan, sistem perizinan, dan pengawasan kawasan wisata. Peran fasilitator diwujudkan melalui penyediaan fasilitas wisata dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Peran katalisator tampak melalui kerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam pengembangan kawasan wisata, sedangkan peran dinamisator dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pengelolaan wisata dan pelestarian lingkungan. Konsep Community Based Tourism (CBT) telah diterapkan melalui keterlibatan masyarakat sebagai pemandu wisata dan pengelola kegiatan wisata. Namun demikian, pengelolaan wisata masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang pariwisata, fasilitas wisata yang belum optimal, serta faktor lingkungan berupa debit air yang tidak stabil akibat pemanfaatan air untuk PLTMH. Oleh karena itu, pengelolaan wisata berbasis masyarakat di Air Terjun Lapopu masih memerlukan peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kerja sama antar pihak terkait, serta pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

## Saran

Balai TN MaTaLaWa diharapkan dapat meningkatkan program pelatihan dan pendampingan masyarakat secara berkelanjutan guna memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, pengembangan fasilitas wisata seperti jalur trekking, tempat istirahat, dan sarana keamanan perlu terus ditingkatkan tanpa mengurangi keaslian kawasan konservasi. Koordinasi antara Balai TN MaTaLaWa dan pihak pengelola PLTMH juga perlu diperkuat agar pengelolaan debit air tetap menjaga keberlangsungan daya tarik wisata Air Terjun Lapopu. Di sisi lain, kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta perlu terus dikembangkan untuk mendukung pengelolaan wisata yang berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memperluas peluang ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan UMKM dan kegiatan wisata berbasis konservasi.

## DAFTAR REFERENSI

- Alivia Yunita Laoh, F., Salim, A., & Ruslan, R. (2021). Strategi pengembangan potensi pariwisata di Pantai Kuri Caddi Desa Nisombalia, Kabupaten Maros. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(2), 114–124. <https://doi.org/10.35965/jups.v1i2.71>
- Ardial. (2014). *Paradigma dan model penelitian komunikasi*. PT Bumi Aksara.
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian pendidikan metode dan paradigma baru*. Remaja Rosdakarya.
- Dougherty, D., & Pritchard, A. (1985). Role theory and organizational behavior. *Journal of Organizational Behavior*, 339–356.
- Hamidi. (2004). *Metode penelitian kualitatif, aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian*. UMM Press.
- Hamit, M. A. (2021). *Peran pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) di Desa Wisata Hijau Bilebante Kabupaten Lombok Tengah* (Skripsi).
- Heri, & Larasati, L. (2012). Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1, 181–190.
- Ilham Zitri, Y., Lestanata, Y., & Pratama, I. N. (2020). Strategi pemerintah desa dalam pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat (community based tourism). *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(2), 99–113. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1531>
- Kansil, C. S. T. (2003). *Sistem pemerintahan Indonesia*. [https://openlibrary.org/books/OL3775068M/Sistem\\_pemerintahan\\_Indonesia](https://openlibrary.org/books/OL3775068M/Sistem_pemerintahan_Indonesia)
- Maddimunri, H. (2015). *Peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros* (Skripsi).

- Manteiro, M. C. B. (2023). Pengembangan pariwisata (community based tourism) sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. *Mutiara Sumber Widy*, 8(2), 190–203. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/784>
- Masriana. (2019). *Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) di Pantai Ide Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7232-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7232-Full_Text.pdf)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). UI Press.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian (triangulasi)*, 1975, 33–43.
- Nawawi, H. (1993). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Page, S. J. (2003). *Tourism management: Managing for change*. Pearson Education.
- Rachman, A. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Rasyid, R. (1998). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. PT Mutiara Sumber Widya.
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1), 1–12.
- Rusdi, F. (2017). Analisis media online dalam pemberitaan pariwisata: Studi kebijakan redaksi Detik Travel dan Tribunnews Travel. *Prosiding Seminar dan Call for Paper*, 123–130.
- Suganda, A. D. (1970). Konsep wisata berbasis masyarakat. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 4(1), 29–41. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v4i1.2181>
- Sugiyono. (2015). *Metodologi penelitian*, 1–12.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.